



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Isu Banjir Impor AC DPR: Mungkin Buat Naikin Pangsa Pasar
Tanggal : Sabtu, 19 Maret 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Isu Banjir Impor AC

DPR: Mungkin Buat Naikin Pangsa Pasar



Darmadi Durianto

ANGGOTA Komisi VI DPR Darmadi Durianto heran dengan adanya kabar bahwa mesin pendingin udara atau *Air Conditioner* (AC) dibanjiri produk impor dari China. Informasi tersebut diyakini keliru dan patut diduga sarat akan kepentingan politik bisnis.

Sikap Darmadi ini merespons pernyataan dari Wakil Direktur PT Panasonic Manufacturing Indonesia (PMI) Daniel Suhardiman. Bawa, produk AC OEM dari China telah mengisi 80 persen pasar domestik sejak masa pandemi.

Politisi senior Fraksi PDI Perjuangan ini menilai informasi tersebut disebar bertujuan agar pemerintah menghentikan impor dari China. Sementara merek tersebut juga diketahui melakukan impor dari China untuk beberapa tipe AC-nya yang dijual di Indonesia.

"Kemungkinan adanya agenda terselubung yang ingin membuat pemerintah untuk menghentikan impor dari China. Tujuannya agar merek yang bersangkutan bisa menaikkan pangsa pasarnya di Indonesia," curiga politisi senior Fraksi PDI Perjuangan ini.

Darmadi sendiri mengaku telah melakukan investigasi ke lapangan atas isu tersebut.

Diakui ada beberapa model merek di atas yang harganya lebih rendah dibandingkan dengan brand Jepang lainnya. Ini pula yang membuat persaingan pasar AC di dalam negeri cukup kompetitif.

"Apabila jika ada suatu merek mengalami penurunan penjualan janganlah langsung mengatakan bahwa ini akibat harga AC impor yang lebih murah. Harus dianalisis apakah strategi marketing dan penjualan yang dilakukan sudah tepat di pasar," tandasnya.

Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (PERPRINDO) Iffan Suryanto menambahkan, adanya informasi yang menyebutkan bahwa AC dari China mendapatkan subsidi *export rebate* dari China sebesar 17 persen tidaklah tepat. Karena AC bukanlah produk yang dimasukkan ke dalam produk prioritas oleh pemerintah China.

"Benar pabrikan China mendapatkan *tax refund* se-waktu melakukan *export*. Tetapi harus dipahami bahwa pabrikan sudah membayar dulu pajak sewaktu membeli material-material produksi dan karena diekspor maka pajaknya direfund," jelasnya.

Menurut Iffan, Ini adalah hal yang normal dilakukan di semua negara dimana pelaku usahanya melakukan kegiatan *export* maka pajak bisa *direfund*. Ini sama halnya dengan kebijakan di dalam negeri di mana pelaku usaha diharuskan membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sewaktu melakukan pembelian barang-barang termasuk barang produksi. ■ KAL